

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Muhammad Rizki Hamdani Rasyid¹, Mike Triani²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: rizkihamdani2812@gmail.com, miketriani@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

30 Mei 2024

Disetujui:

28 Juni 2024

Terbit daring:

28 Juni 2024

DOI: -

Sitasi:

Rasyid, M. R. H. & Triani, M. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Abstract:

This research aims to evaluate the impact of government spending in the health, education and labor force participation sectors on poverty levels in the districts/cities of West Sumatra Province. The method used is panel regression analysis, which combines time series and cross section data during the 2018-2022 period involving 19 districts/cities. The research results show that government spending in the health sector has a negative relationship with poverty levels, although it is not statistically significant in the region. Meanwhile, government spending in the education sector has a positive, but not significant, impact on poverty levels in the districts/cities of West Sumatra Province. In addition, labor force participation has a negative and significant impact on poverty levels in districts/cities in West Sumatra province.

Keywords: Government Expenditures in the Health Sector 1; Government Expenditures in the Education Sector 2; Labor Force Participation Levels 3; Poverty Levels 4.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah analisis regresi panel, mencakup data time series dan cross section selama periode 2018-2022 dengan 19 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memiliki hubungan negatif, meskipun tidak signifikan secara statistik. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki dampak positif, tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Partisipasi angkatan kerja memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan 1; Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan 2; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 3; Tingkat Kemiskinan 4

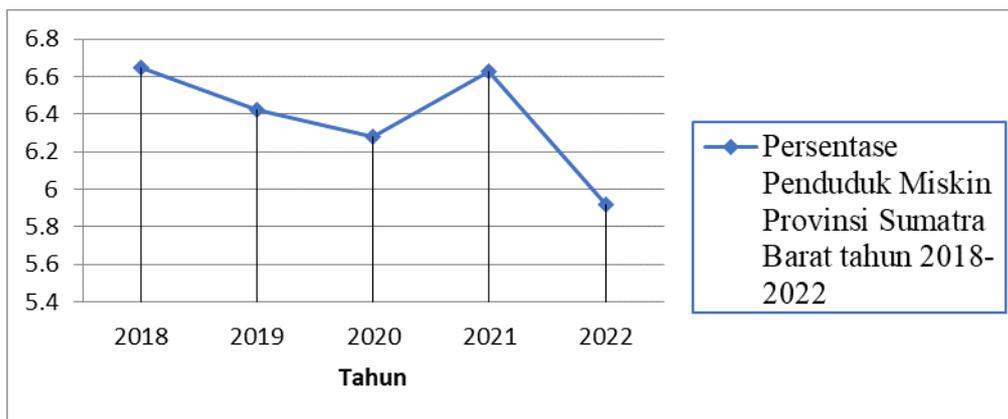
Kode Klasifikasi JEL: H51, H52, J21

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terdapat penegasan bahwa tujuan utama pemerintah adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Konsep kesejahteraan yang disebutkan dalam pembukaan ini mencakup berbagai aspek, tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan, melainkan juga pada upaya meratakan distribusi pendapatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tantangan utama yang terus dihadapi di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan dianggap sebagai isu kompleks dan multidimensional yang menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan, ketertinggalan, rendahnya

tingkat produktivitas, keterbatasan akses, dan pendapatan yang rendah yang diterima oleh sebagian masyarakat.(Putri et al., 2019)

Di provinsi Sumatera Barat, pada kekayaan alamnya yang melimpah, masih saja menghadapi permasalahan serius dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang mempengaruhi kehidupan jutaan penduduk. Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat masih cukup tinggi, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi isu krusial dalam upaya pembangunan di daerah ini. Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian integral dari Indonesia, tidak luput dari tantangan ini. Meskipun mempunyai potensi alam dan sumber daya manusia yang beragam, tingkat kemiskinan yang masih signifikan di provinsi ini menjadi perhatian serius dalam upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan dan mengurangi tingkat kemiskinan.



Sumber : (Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2023)

Pada gambar di atas dijelaskan bahwa tahun 2018-2022 persentase penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami Trend Fluktuasi. Penyebab terjadinya Fluktuasi dikarenakan beberapa faktor yaitu ketidakstabilan ekonomi, kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan. Pada gambar di atas persentase penduduk miskin di provinsi Sumatera Barat tertinggi terjadi tahun 2018 mencapai 6.65%. dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis mencapai 5.92%.

Bank Dunia (2022) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan perspektif ini dapat dilihat dari berbagai sudut. Pertama, dalam dimensi konvensional, kemiskinan diukur secara moneter dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi individu dengan batasan tertentu. Jika individu berada di bawah batasan tersebut, mereka dianggap miskin. Namun, Bank Dunia menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya terbatas pada dimensi moneter. Definisi ini mencakup aspek kemiskinan nutrisi, yang dievaluasi dengan memeriksa apakah pertumbuhan anak terhambat. Selain itu, kemiskinan juga dapat termanifestasi dalam kurangnya akses pendidikan, diukur dengan indikator seperti tingkat buta huruf. Kekurangan kemampuan dasar dalam masyarakat dapat menciptakan lingkungan di mana pendapatan dan pendidikan tidak mencukupi, disertai masalah kesehatan, ketidakamanan, dan rendahnya kepercayaan diri. Dengan demikian, kemiskinan dianggap sebagai fenomena multidimensional, dan solusinya diakui sebagai suatu tantangan kompleks.

Kemiskinan terkait dengan kurangnya lapangan pekerjaan dan juga dapat terkait dengan kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh ketidakmampuan mendapatkan akses terhadap air bersih. Dalam konteks ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakberdayaan, kurangnya keterwakilan atau representasi, dan kebebasan. Menurut A pada tahun 1999, konsep kemiskinan tidak hanya dapat diukur dari segi pendapatan semata, tetapi juga terkait dengan kehilangan kapabilitas atau deprivasi kapabilitas. Kapabilitas

disini merujuk pada kebebasan seseorang untuk menjalankan fungsinya sebagai manusia, yang menentukan bagaimana mereka dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Disisi lain anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan terhadap kemiskinan yang secara nasional maupun provinsi terus bertambah setiap tahunnya. Akan Tetapi apakah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan tersebut dapat menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan belum diketahui. Karena peran pemerintah terhadap kemiskinan mempunyai efek yang sangat besar. Salah satu acuan kebijakan fiskal pemerintah dalam mengelola perekonomian dalam biaya yang dikeluarkan pemerintah yang bisa dilihat pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Struktur APBN yang digunakan saat ini yaitu anggaran berbasis kinerja sesuai dengan UU No.1 tahun 2004. dari tahun 1969 diaplikasikan sistem berimbang dan dinamika untuk penyusunan APBN.

Pengeluaran pemerintah salah satu pilar utama kebijakan fiskal, dan pengelidikan ekstensif mengenai pengaruhnya biasanya berakhir dengan hasil yang beragam. Literatur berpendapat bahwa ada trade-off antara manfaat dan biaya ketika mempertimbangkan pengeluaran pemerintah. Ada kemungkinan efek U terbalik dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, peningkatan pengeluaran pemerintah dari pemerintah berukuran kecil dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi sebagai efek crowding in. Namun demikian, pengeluaran publik yang berlebihan dapat menimbulkan efek crowding-out, yang akan merugikan pembangunan ekonomi (Nguyen & Su, 2022).

Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor kesehatan adalah bagian yang dibutuhkan pada indeks kemiskinan. Kebijakan pemerintah menjamin hak warga negara untuk tetap sehat dengan cara memfasilitasi layanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau dengan biaya relatif murah agar bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat bahkan dari kalangan yg rendah

Permasalahan yang terjadi di pengeluaran pemerintah disektor pendidikan ialah akses pendidikan dimana salah satu isu yang sering muncul adalah ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Dimana ketika pemerintah mengurangi atau tidak memadai pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, maka mungkin ada penurunan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok yang kurang mampu. Ini bisa menyebabkan lebih banyak anak miskin tidak mendapatkan pendidikan yang layak, yang dapat memperburuk kemiskinan. Selain isu yang terjadi pada pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ialah kualitas pendidikan, dimana pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan yang rendah juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Kurangnya sumber daya fasilitas, serta gaji guru yang rendah, dapat mengurangi kualitas pendidikan. Ini bisa menghasilkan lulusan yang kurang berkualitas dan kurang siap untuk bekerja, yang kemudian dapat berdampak pada tingkat kemiskinan.

Pada saat indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1998, terjadi perubahan dalam pembangunan lapangan kerja serta tumbuhnya pilihan pekerjaan. Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja di antara mereka yang dipekerjakan dari bermacam-macam lapangan kerja menjadi buktinya.

Angkatan kerja mencakup penduduk dalam usia kerja yang terdiri dari individu yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun saat ini tidak bekerja karena cuti, sakit, dan sebagainya, serta mereka yang menganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja. TPAK dapat dihitung untuk semua tenaga kerja yang tersedia atau untuk jumlah tenaga kerja dalam suatu kelompok tertentu, seperti kelompok desa-kota, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat. Terkait dengan perumusan tenaga kerja, setiap negara memiliki batasan yang berbeda. Sebagai contoh, Amerika Serikat memiliki batas usia minimal tenaga kerja sebesar 16 tahun, India menetapkan rentang usia 14-60 tahun, sementara Indonesia menetapkan batas usia 18 tahun atau lebih.

Ketika angkatan kerja menurun maka akan meningkatkan angka kemiskinan yang ada karena banyaknya masyarakat yang tidak bekerja menyebabkan pendapatan dalam rumah tangga berkurang dan pendapatan yang diterima lebih kecil dari pengeluaran yang harus dikeluarkan. Sampai saat ini pemerintah masih mengupayakan dalam meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja, karena TPAK menjadi salah satu sumber dari kemiskinan. Jika di suatu wilayah memiliki masyarakat dengan angkatan tidak bekerja lebih banyak maka bisa meningkatkan jumlah masyarakat miskin, serta sebaliknya, menjadi sebuah ukuran yang dipakai untuk melihat trend fluktuasi dari partisipasi angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi. (Mala et al., 2017).

Angkatan kerja serta bukan angkatan kerja adalah divisi dasar dari tenaga kerja, Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) ialah rasio penduduk usia kerja terhadap angkatan kerja. Karena TPAK juga ikut membantu atau berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas warga sekitar. Intinya, TPAK bertujuan untuk mendapatkan upah untuk menghadapi dirinya serta keluarganya. Mengingat beberapa faktor penyebab kemiskinan adalah angkatan kerja yang sedikit, pemerintah tetap berupaya menaikkan tingkat TPAK. Tingkat pengangguran yang lebih tinggi di suatu daerah akan memiliki pengaruh pada jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut, begitu sebaliknya. (Mala et al., 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data runtut waktu 5 tahun dari tahun 2018-2022 dengan data cross section yang berasal dari 19 kabupaten/kota, kemudian menggunakan data panel yakni menggabungkan antara data time series (tahun 2018-2022 : 5 tahun) dengan data cross section 19 kabupaten/kota yang didapatkan dari publikasi DJPB kemenkeu, BPS dari Provinsi Sumatera Barat dan berupa referensi, perpustakaan dan literatur.

Dalam penelitian ini, variabel yang diamati terdiri dari variabel terikat, yaitu Tingkat Kemiskinan. Kemudian, terdapat variabel bebas yang melibatkan Pengeluaran Pemerintah di sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Data panel merupakan kombinasi antara data silang (cross section) dan rata runtut waktu (time series), yang mencakup suatu objek ataupun individu. Melainkan mencakup beberapa waktu, sementara data silang terdiri dari sejumlah objek atau responden yang diamati pada waktu-waktu tertentu dengan berbagai jenis data yang relevan. (Winarto, 2009). Adapun model yang dipakai dalam analisis data panel dari penelitian ini adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + U_{it}$$

Berdasarkan persamaan di atas Y = Kemiskinan yang diukur dengan satuan persen, X_1 = Pengeluaran Pemerintah di sektor Kesehatan yang diukur dengan satuan Miliar Rupiah, X_2 = Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan yang diukur dengan satuan Miliar

Rupiah, dan X_3 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan satuan jiwa, i = cross section, t = time series, u = error term.

Dalam melakukan estimasi pada data panel terdapat beberapa pengujian digunakan untuk pemilihan Metode Estimasi yang terbaik yaitu :

1) *Common Effect Model (CEM)*

Common Effect Model (CEM) merupakan model regresi data panel yang paling sederhana dikarenakan menyatukan data *time series* dan *cross section*. Model ini hanya menggabungkan tidak harus melihat perbedaan antar waktu dan individu, hanya memiliki satu data yaitu variabel dependen dan variabel independen. Dalam CEM, metode estimasi yang umum digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk memperkirakan parameter model data panel tersebut

2) *Fixed Effect Model (FEM)*

Fixed Effect Model merupakan jenis regresi data panel yang memperhitungkan efek antar individu. Model ini, mencoba memodelkan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi melalui perbedaan intersepnya. Dalam hal ini, teknik estimasi data panel menggunakan variabel dummy untuk menangkap perbedaan-perbedaan intersep antar individu, dan model ini sering disebut sebagai Least Square Dummy Variable (LSDV). Teknik ini dapat diterapkan baik pada unit cross section maupun unit time series, menyediakan pendekatan yang fleksibel untuk menangani efek antar individu dalam analisis data panel.

3) *Random Effect Model*

Random Effect Model diperkirakan pada data panel yang variabel residual diperkirakan mempunyai keterkaitan antar waktu dan subjek. Menurut Widarjono (2009) Random Effect Model digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi kelemahan model Fixed Effect yang memanfaatkan variabel dummy. Metode analisis data panel dengan menggunakan model random effect memerlukan pemenuhan syarat tertentu, seperti jumlah cross section yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah variabel dalam penelitian. Model ini dikenal sebagai Error Components Model (ECM) karena residualnya berasal dari dua aspek. Berbeda dengan model fixed effects, efek khusus dari suatu individu dianggap sebagai bagian dari komponen error yang bersifat acak dan tidak berkaitan dengan variabel penjelas yang diamati. Oleh karena itu, metode Ordinary Least Squares (OLS) tidak dapat digunakan untuk mengestimasi model random effect secara efektif. Metode yang lebih sesuai untuk menaksir model random effect adalah Generalized Least Squares (GLS) dengan asumsi homoskedastisitas dan tanpa adanya cross-sectional correlation.

2. Pengujian Model dan Analisis Statistik

Dalam memilih model yang paling sesuai dalam analisis data panel dengan tujuan penelitian, beberapa pengujian dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Uji Chow (Uji Statistik F)
perbandingan antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model dilakukan untuk menentukan model terbaik dalam mengestimasi data panel.
- 2) Uji Hausman
Uji Hausman adalah suatu pengujian statistik yang digunakan untuk menentukan pilihan antara model Fixed Effect atau Random Effect yang paling sesuai dalam analisis data panel. Kemudian jika sudah menggunakan Uji Chow kemudian model

yang paling sesuai di dapatkan yaitu *Fixed Effect*, Kemudian dilanjutkan dengan menguji model apakah yang paling tepat antar *Fixed Effect* atau *Random Effect*, pengujian ini yang disebut dengan Uji hausman (Amaliah et al.,2020)

3) Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji Hausman yakni uji yang dipakai untuk memastikan metode yang akan dipakai untuk memperkirakan antara random effect dengan fixed effect.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji autokolerasi

adalah hubungan yang terdapat pada aspek berdasarkan sejumlah pengamatan yang disusun dalam rangkaian waktu ataupun yang disusun pada rangkaian ruang (Sumodiningrat.2007). Adanya autokorelasi dikarenakan penelitian yang beruntut dalam beberapa periode mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Permasalahan ini terjadi karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu.

2. Uji Heterokedastisitas

Digunakan dalam menguji apakah suatu model regresi memiliki perbedaan *varians* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila kondisi *varians* dari *residual* atau error tern dalam model regresi yaitu konstan, maka kondisi ini disebut homoskedastis. Apabila sebaliknya, maka disebut heteroskedatis.

3. Uji Multikolinearitas

Suliyanto (2011) menjelaskan bahwa multikolinieritas mencerminkan adanya korelasi linear yang mendekati sempurna antara dua variabel bebas. Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi tinggi atau bahkan sempurna antara variabel bebas dalam suatu model regresi. Jika ditemukan model regresi tersebut terdapat korelasi tinggi atau bahkan sempurna antara variabel bebas, hal ini diinterpretasikan sebagai adanya indikasi multikolinieritas.

Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)
2. Uji t (Uji Koefisien Regresi secara Parsial)
3. Uji F (Koefisien Regresi Secara Keseluruhan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian regresi panel digunakan untuk mengevaluasi dampak variabel independen terhadap variabel dependen dengan memanfaatkan data panel, yang mencakup informasi dari dua dimensi, yaitu waktu dan tempat. Dengan analisis ini, kita dapat menilai sejauh mana pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja memengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil estimasi regresi data penelitian menggunakan *Fixed Effect Model* diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 1 : Hasil Estimasi Uji Fixed Effect

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-statistic	prob
C	41.97559	9.659839	4.345371	0.0000
PPSP	-0.291083	0.245752	-1.184461	0.2401
PPSK	0.137079	0.224377	0.610933	0.5431
TPAK	-2.934732	0.872873	-3.362153	0.0012
R-Square			0.985888	
Adjusred R-Square			0.981828	
F-statistic			242.8469	
Prob (F-statistic)			0.000000	

Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 12,2023

Menurut hasil persamaan, di peroleh nilai koefisien konstanta (C) sebesar 41,97, yang berarti ketika semua variabel naik sebesar 1% secara rata-rata maka kemiskinan mengalami peningkatan koefisien regresi sebesar 41.97 dengan asumsi *cateris paribus* Dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor-sektor tersebut serta peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Tabel 1 memperlihatkan yang memiliki nilai koefisien regresi pada pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan adalah sebesar -0.291 dan berhubungan negatif terhadap variabel kemiskinan. berarti ketika pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan meningkat 1% maka kemiskinan mengalami penurunan sebesar -0.2% dengan asumsi *cateri paribus*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Mardiana et al., 2018), yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah di bidang kesehatan memiliki dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan. Ini berarti bahwa usaha pemerintah daerah dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan pengelolaan pembelanjaan yang proporsional, efektif, dan efisien di bidang kesehatan dianggap tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun demikian, kendati pemerintah berupaya memaksimalkan biaya di sektor kesehatan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat menengah ke bawah atau kurang mampu yang belum mendapatkan layanan rumah sakit secara optimal.

Tabel 1 memperlihatkan hasil estimasi yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.137 pada variabel pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan. Berarti ketika pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan meningkat 1% kemiskinan akan menjadi meningkat sebesar 0.13% di kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian lain (Nurul Fadillah, Wardihan Sabar, 2023) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan, jika tidak ditargetkan dengan tepat, tidak akan efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun terdapat peningkatan anggaran belanja pemerintah di bidang pendidikan setiap

tahunnya, nyatanya masih belum mampu mengatasi kesulitan penduduk miskin dalam mendapatkan pendidikan berkualitas, yang pada akhirnya dapat membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf ekonomi. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Theresia (2017) yang menyimpulkan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Dari hasil estimasi dalam Tabel 1, dapat diamati bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel tingkat partisipasi angkatan kerja adalah -2.934 . Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Lebih spesifik, hasil ini mengindikasikan bahwa ketika tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 1%, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut akan mengalami penurunan sebesar 0.29%.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Seruni (2012), yang menyatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang rendah merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan pengangguran, karena beberapa keluarga yang dianggap miskin ternyata memiliki pendapatan tetap. Keadaan ini terjadi karena pendapatan yang diterima oleh keluarga tersebut sangat minim, yang pada akhirnya dipengaruhi oleh produktivitas kerja yang rendah. Oleh karena itu, selain faktor pendapatan, produktivitas tenaga kerja juga memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018-2022, diperoleh kesimpulan yang penting. Dalam konteks analisis data panel, variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, meskipun tidak signifikan secara statistik. Hasil ini menggambarkan bahwa peningkatan investasi pemerintah di sektor kesehatan dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan pengeluaran di sektor kesehatan dapat memberikan kontribusi positif terhadap akses masyarakat yang kurang mampu terhadap layanan kesehatan. Adanya fasilitas kesehatan yang terjangkau dan layanan yang berkualitas dapat memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat miskin, mengurangi beban biaya kesehatan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan target dari pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, yang belum merata dan menyeluruh ke masyarakat miskin. Dalam konteks ini, terlihat bahwa alokasi dana pendidikan belum efektif mencapai mereka yang membutuhkan bantuan terbesar, yaitu masyarakat miskin. Dampak positif dari pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap tingkat kemiskinan masih tergolong rendah karena ketidakmerataan distribusi manfaatnya. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya pendidikan yang memadai. Disamping itu, ketidakseimbangan antara penawaran lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan dampak yang kurang signifikan dalam menekan peningkatan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk merinci dan menyesuaikan strategi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan guna meningkatkan dampaknya dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama dengan memperhatikan faktor-faktor seperti distribusi dana yang lebih merata dan perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat.

Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Ini berarti semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini peningkatan partisipasi angkatan kerja dapat membawa dampak positif terhadap ekonomi dan distribusi pendapatan, karena lebih banyak orang memiliki akses terhadap pekerjaan dan penghasilan. Ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan lebih banyak kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun penting untuk diingat bahwa kolerasi tidak selalu menyiratkan kualitas langsung, beberapa faktor lain, seperti struktur ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tingkat pendidikan, juga dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Daftar Rujukan

- Mala, V. S. N., Suyadi, B., & Sedyati, R. N. (2017). Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 11(1), 130. <https://doi.org/10.19184/jpe.v11i1.5014>
- Nguyen, C. P., & Su, T. D. (2022). The influences of government spending on energy poverty: Evidence from developing countries. *Energy*, 238, 121785. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121785>
- Putri, R. Y., Azhar, Z., & Putri, D. Z. (2019). Analisis Kemiskinan Berdasarkan Gender Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 603. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6285>